

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1976

(PIDATO DAN LAMPIRAN)

DEPARTEMEN PENERANGAN R 1



*Presiden Republik Indonesia
Soeharto*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPR yang saya hormati;

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Besok pagi adalah tanggal 17 Agustus 1976. Hari Ulang Tahun. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-31.

Kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, yang untuk kesekian kalinya — Insy Allah -, memberi kesempatan kepada kita semua Bangsa Indonesia untuk memperingati hari ulang tahun Kemerdekaannya besok.

31 tahun kita telah Merdeka!

Kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan yang panjang, sangat panjang: puluhan dan puluhan tahun ke belakang jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Suatu perjuangan yang penuh derita lahir dan batin, mendera generasi dan generasi, menimpa kakek dan ayah serta anak dan cucu. Tidak terbilang mereka yang menderita, agar kita yang hidup hari ini tidak menderita lagi Tidak terbilang mereka yang mengorbankan hidupnya kepada Tanah Air, agar kita dapat tetap hidup sekarang.

Hidup dalam kehidupan sebagai Bangsa yang merdeka; bukan hidup dalam kematian sebagai Bangsa yang terjajah hina!

Mereka berkorban untuk kejayaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, untuk kemuliaan dan kebahagiaan kita yang hidup hari ini dalam kehormatan dan martabat Bangsa yang berdaulat dan merdeka.

Memang, Bangsa Indonesia telah ikhlas memberi segala pengorbanan untuk merdeka. Bukan hanya merdeka untuk hidup bebas dari penjajahan asing; melainkan, dalam hidup merdeka itu kita semua harus dapat menikmati kehidupan lahir batin yang makin baik.

Karena itu, setiap kali kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, kita selalu digoda oleh suatu pertanyaan pokok. Pertanyaan-pokok itu juga menggoda kita semua saat ini, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-31 besok pagi.

Pertanyaan pokok itu adalah: Sumbangan apakah yang telah kita berikan bagi kemajuan, kesejahteraan dan kejayaan Bangsa dan Negara yang telah merdeka ini. Dan dari pertanyaan pokok itu timbulah pertanyaan yang lebih khusus lagi dalam tahapan perjuangan Bangsa dewasa ini, ialah apakah sumbangan kita dalam kegiatan pembangunan Bangsa sebagai usaha mengisi kemerdekaan menuju kepada masyarakat adil dan makmur, yang setahap demi setahap dapat menciptakan kemajuan dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi kita semua!

Jawaban atas semua pertanyaan itu harus; kita kembalikan pada putusan sejarah yang telah kita ambil ketika kite menegakkan Orde Baru sepuluh tahun yang lalu. Dan tugas-tugas sejarah apa yang kita pikulkan dengan sadar di atas pundak kita sendiri untuk Bangsa dan Negara kita di masa datang.

Semuanya itu perlu kita renungkan ulang sekarang ini! Kita renungkan ulang dengan kebersihan hati dan ketulusan, dengan keberanian dan kejujuran.

Renungan tadi harus kita kembalikan kepada cita-cita Orde Baru, sebab tatkala kita menegakkan Orde Baru maka tekad kita justru

untuk meluruskan kembali perjalanan kita agar tujuan dan cita-cita Indonesia Merdeka benar-benar menemukan kembali semangat dan arahnya yang murni.

Orde Baru tidak lain adalah tatanan kehidupan Rakyat, Bangsa dan Negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Orde Baru lahir dengan tekad yang dalam untuk meluruskan kembali sejarah perjalanan Bangsa dan Negara kita, berlandaskan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang selurus-lurusnya seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar '45. Karena itu Orde Baru merupakan koreksi total terhadap segala macam penyimpangan sejarah kita di masa lampau sejak tahun 1945 sampai dengan 1965. Orde Baru juga memelihara dan malahan memperkuat hal-hal yang benar dan lurus dari pengalaman dan hasil sejarah kita dalam masa yang lampau itu. Dan karena itu pula, Orde Baru sesungguhnya merupakan koreksi total oleh kita terhadap diri kita sendiri, koreksi total terhadap kekeliruan kita dan untuk kebaikan kita. Koreksi total ini meliputi pikiran dan tingkah laku kita, menyangkut semangat dan tindakan kita, yang semuanya — sekali lagi — kita kembalikan kepada kemurnian cita-cita Kemerdekaan, pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Dengan latar belakang yang demikian itu maka Orde Baru adalah orde yang disatu fihak gandrung dan berjoang untuk menegakkan demokrasi; bukan demokrasi liberal, juga bukan demokrasi Rakyat ala negara-negara sosialis, tetapi demokrasi berkepribadian Indonesia, demokrasi Pancasila dan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Dilain fihak Orde Baru adalah orde yang berjoang untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan Bangsa, pembangunan yang dijiwai dan dibimbing oleh Pancasila dan berdasarkan semangat Mukadimah dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa Orde Baru adalah orde konstitusionil dan sekaligus orde pembangunan. Kehidupan konstitusionil dan pembangunan itu merupakan loco-loroning atung-

gal yang tak terpisahkan, saling kait mengkait secara erat, bagaikan isi dan bentuk yang serasi dan bulat, merupakan tujuan dan tata-cara mencapai tujuan yang cocok dan saling membutuhkan.

Oleh karena itu maka dua terra atau masalah pokok yang dihadapi dan diemban oleh Orde Baru adalah bagaimana kita dapat makin menghayati dan mengamalkan kehidupan konstitusional itu serta bagaimana kita semua dapat menghayati tugas dan kewajiban kita yang dituntut oleh cita-cita kemerdekaan ialah melaksanakan pembangunan yang adil dan merata bagi Rakyat banyak.

Undang-Undang Dasar '45 yang mengandung tata-cara dasar dalam mengatur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan itu memberi kesempatan yang paling besar bagi kelancaran dan kelangsungan pembangunan.

Unsur-unsur penting bagi pembangunan bangsa seperti stabilitas dan dinamika, keikutsertaan Rakyat dan kreativitas, jaminan kelangsungan pembangunan dan jika perlu penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan — cukup tertampung secara luas dalam Undang-Undang Dasar '45. Undang-Undang Dasar '45 memang singkat saja, dalam arti pasal-pasalnyanya tidak banyak, namun asas-asas negara moderen dan susunan negara yang sebulat-bulatnyanya telah terkandung di dalamnya.

Penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap Undang-Undang Dasar merupakan syarat mutlak bagi tumbuh kokohnya suatu bangsa. Kita pernah berdiri goyah dalam masa Orde Lama, antara lain, karena semangat dan bunyi Undang-Undang Dasar '45 itu kita abaikan. Sungguh, tidak ada satu bangsapun yang dapat hidup tertib dan kokoh apabila ia mengabaikan Undang-Undang Dasar-nya sendiri.

Orde Baru ingin membangun Bangsa dan Negara ini secara tertib dan langgeng. Kita ingin menjadi Bangsa yang kokoh dan sentosa. Karena itu kita bertekad untuk menghormati dan menjalankan Undang-Undang Dasar '45,

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar itu harus kita tegakkan sejujurnya : ditegakkan Oleh Presiden, oleh MPR oleh DPR, oleh Mah-

kamah Agung, oleh Dewan Pertimbangan Agung, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, oleh semua kekuatan-kekuatan sosial politik, oleh seluruh masyarakat. Pendeknya oleh kita semuanya tanpa kecuali. Apabila Undang-Undang Dasar tidak kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, maka stabilitas nasional yang menjadi syarat penting pembangunan pasti akan terganggu; dan pada gilirannya pembangunan itu sendiri juga terganggu. Gangguan terhadap pembangunan menjauhkan kita dari tujuan cita-cita Kemerdekaan. Ini tidak berarti bahwa segala-galanya di "korban"kan demi dan dengan dalih untuk kelancaran pembangunan; seolah-olah kebebasan dan tanggung jawab berpikir dimatikan hanya agar pembangunan lancar. Justru sebaliknya, kebebasan dan tanggung jawab itu harus berkembang agar pembangunan berjalan lancar. Tetapi satu hal juga sangat jelas, bahwa semuanya harus berjalan dengan tertib dan arahnya harus jelas menuju kepada pembangunan lahir batin Bangsa kita. Setiap warga-negara dijamin dan dilindungi hak-haknya sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar '45.

Oleh karena itu jangan ada orang-orang atau kelompok apapun dalam Orde Baru ini, dengan dalih apapun mempunyai aspirasi atau pun berusaha untuk melakukan kegiatan yang melanggar atau menyimpang dari konstitusi.

Undang-Undang Dasar '45 telah memberi petunjuk kepada kita mengenai kerangka kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang stabil; dan di samping itu juga memberi arah yang jelas.

Undang-Undang Dasar '45 menegaskan bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. MPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil kekuatan politik dan wakil-wakil daerah — yang dipilih melalui Pemilihan Umum —, bertugas membuat GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu lima tahun.

Presiden adalah Mandataris MPR untuk melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Sebab itulah, apabila kita sekarang melaksanakan Pembangunan Lima Tahun, maka rencana pembangunan

ini tidak lain merupakan pelaksanaan dari GBHN- yang ditetapkan oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dan jika secara berkala kita menyelenggarakan Pemilihan Umum, maka hal itupun merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat.

Presiden harus menjalankan Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR. Sedangkan DPR dapat dan harus mengawasi segala tindakan Presiden. Untuk itu DPR diberi cara agar pengawasannya benar-benar dapat berjalan, seperti hak budget, hak menyetujui pembuatan Undang-undang dan lain-lain. Dan jika DPR — yang seluruh anggotanya adalah juga anggota MPR menilai bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR, maka Majelis dapat diundang untuk mengadakan persidangan istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden:

Kesempatan untuk menilai seorang Presiden akhirnya akan ditentukan oleh Sidang MPR lima tahun berikutnya, suatu MPR yang baru dipilih oleh Rakyat dalam Pemilihan Umum. Dalam sidang itu-lah Presiden wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya seperti yang ditetapkan dalam GBHN. Dan penilaian itu akan menentukan apakah ia akan mendapatkan kepercayaan lagi atau tidak dari wakil-wakil Rakyat untuk menjadi Presiden/Mandataris, untuk melaksanakan GBHN yang bare untuk lima tahun mendatang.

Selama Orde Baru kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan konstitusi Undang-Undang Dasar '45 sebaik-baiknya.

Selama sepuluh tahun Orde Baru ini telah kita rasakan bersama proses dan perkembangan dalam menegakkan dan hasil-hasil kehidupan konstitusional. Orde Baru telah melakukan koreksi terhadap kepemimpinan dan kebijaksanaan politik Orde Lama yang telah menyimpang dari ketentuan dan semangat Undang-Undang Dasar '45 dengan cara-cara konstitusional, melalui sidang-sidang MPR(S). Kita telah menegakkan lembaga-lembaga konstitusional seperti MPR, DPR melalui Pemilihan Umum yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang, sedangkan lembaga-lembaga konstitusional lainnya seperti DPA, Mahkamah Agung dan BPK juga telah kita

disusun berdasarkan ketentuan konstitusi yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Kita telah dua kali memiliki Presiden yang dipilih oleh Badan Konstitusional yang sah, kita telah melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang, kita telah memiliki GBHN yang dibuat oleh Lembaga yang sah dan berwenang ialah MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sebaik-baiknya. Dan kita telah berkesempatan melaksanakan pembangunan dengan bergairah dan dalam suasana aman berdasarkan GBHN itu, yang hasil-hasilnya telah dapat kita rasakan bersama.

Sekarang kita sedang bersiap-siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan memilih wakil-wakil Rakyat untuk MPR, DPR dan DPRD yang kemudian Badan tertinggi terpilih itu — MPR — akan mengadakan sidang umumnya pada tahun 1978 untuk merumuskan GBHN baru dan memilih Presiden dan Wakil Presiden baru pula.

Dalam kerangka pemikiran-pemikiran dasar itulah hendaknya kita menyiapkan diri menghadapi Pemilihan Umum tahun depan.

Saya katakan kita harus bersiap-siap, karena Pemilihan Umum tidak saja memerlukan persiapan teknis seperti misalnya peralatan dan sejenisnya. Yang lebih penting dari itu ialah persiapan mental. Kita semua sejak pagi-pagi harus telah membentengi jiwa dan niat kita agar Pemilihan Umum nanti benar-benar berjalan lancar, selamat dan mencapai tujuannya.

Kita melaksanakan Pemilihan Umum untuk terus menumbuhkan kehidupan demokrasi, untuk memantapkan kehidupan konstitusional dan untuk melanjutkan usaha pembangunan Bangsa. Oleh karena itu Pemilihan Umum itu sendiri merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan Bangsa, katakanlah pembangunan di bidang Politik. Bukan hanya untuk masa sekarang, bukan hanya untuk menghasilkan MPR dan DPR yang baru nanti saja, yang kemudian akan memilih Presiden yang akan datang, tetapi merupakan langkah strategis jangka panjang membangun sistem kehidupan kenegaraan yang mantap, stabil, dinamis dan berkepribadian, yang akan berjalan dan berputar terus setiap lima tahun.

Oleh karena itu marilah kita songsong dan laksanakan Pemilihan Umum itu sebaik-baiknya. Pelaksanaan Pemilihan Umum tinggal beberapa bulan lagi. Kampanye Pemilihan Umum juga akan dilaksanakan pada saatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi dari mimbar ini saya ajak kita semua untuk that pada dan melaksanakan aturan permainan yang telah jelas ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Marilah kita taati aturan, permainan itu menurut semangat dan bunyinya.

Sudah barang tentu setiap peserta Pemilihan Umum ingin mencapai kemenangan yang maksimal, namun semua pihak yang ingin menang dalam Pemilihan Umum nanti hendaknya bersifat kesatria dan jujur; baik selama kampanye maupun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri. Dan harus selalu kita ingat bahwa ketiga peserta dalam Pemilihan Umum, yaitu dua Partai Politik dan satu Golongan Karya adalah saudara-saudara sekandung dalam keluarga besar Bangsa Indonesia yang satu, merupakan komponen Orde Baru yang telah menerima dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hendaknya kita camkan baik-baik: Pemilihan Umum bukanlah untuk membuat kita bercerai-berai. Sebaliknya, Pemilihan Umum harus merupakan sarana untuk makin memperkuat persatuan kita secara kreatif agar makin mantaplah persatuan itu.

Hal itu sama sekali tidak berarti bahwa kebebasan Partai Politik dan Golongan Karya dibatasi. Juga tidak berarti bahwa Partai Politik dan Golongan Karya kehilangan tanda diri atau kepribadiannya. Tanda diri atau kepribadian Partai Politik dan Golongan Karya terletak pada gagasan-gagasan dan cara-cara melaksanakan gagasan untuk pembangunan Bangsa kite. Dengan demikian make Partai Politik dan Golongan Karya dapat menjadi kekuatan pembaharuan Bangsa kita, yang memang kita perlukan dalam proses pembangunan. Masyarakat yang mau maju perlu terus menerus mengadakan dialog antara mereka, perlu terus menerus bertukar pikiran secara luas. Dalam bertukar pikiran tentu saja ada perbedaan pendapat. Dan berbeda pendapat bukanlah hal yang buruk.

Dengan berbeda pendapat kita justru mencari yang lebih baik bagi kita semua. Dengan demikian masyarakat merasa ikut serta dalam memikirkan dan bertanggung jawab terhadap nasib dan masa depannya sendiri. Dengan demikian juga berarti ada kekuatan gerak dan kreativitas. Partai Politik dan Golongan Karya adalah wadah dari semuanya itu, malahan merupakan wadah yang mutlak dalam kehidupan demokrasi kita

Apabila semua itu dapat kita kembangkan bersama maka setiap Pemilihan Umum boleh saja menjadi pertarungan besar antara gagasan-gagasan dan rencana-rencana dalam membangun bangsanya. Tetapi jelas bukan pertarungan antara kekuatan-kekuatan! Dengan demikian kita dapat mengembangkan stabilitas yang dinamis. Stabil: karena tidak timbul kegelisahan dan kegoncangan. Dinamis: karena lahir gagasan-gagasan baru yang segar dan berguna bagi pembangunan masyarakat.

Karena itu Pemilihan Umum harus berjalan sebaik-baiknya dengan perasaan yang setenteram-tenteramnya di hati Rakyat, agar mereka dapat dengan tenang dan sadar menentukan pilihannya.

Rakyat memang perlu diberitahu untuk apa Pemilihan Umum itu dan bagaimana caranya melaksanakan haknya dalam Pemilihan Umum itu; tetapi tidak perlu menimbulkan rasa takut atau ditakut-takuti; tidak boleh ada paksaan atau dipaksa-paksa. Dengan paksaan demokrasi tidak akan tumbuh; dengan ditakut-takuti demokrasi akan mati.

Kita telah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Kita akan terus memetik pelajaran dari pengalaman-pengalaman kita sendiri: pengalaman yang baik maupun pengalaman yang kurang baik.

Kita bertekad untuk membuat lebih baik apa yang sudah baik, sama besarnya dengan tekad kita untuk membuat baik apa yang dahulu belum baik.

Dalam pada itu kita juga menyadari bahwa pembangunan demokrasi dan pembangunan kehidupan politik juga bukan pekerjaan yang akan selesai dalam satu dua tahun atau melalui satu dua kali Pemilihan Umum saja. Kesadaran ini lah yang mendorong kita semua untuk terus memperbaiki cara-cara kita melaksanakan Pemilihan Umum. Dalam

pelaksanaan Pemilihan Umum ini saya telah mendapat nasehat-nasehat yang sangat berguna dari Dewan Pertimbangan Agung. Pada pokoknya nasehat-nasehat itu sejalan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan Pemerintah. Nasehat-nasehat itu dapat menjadi bahan untuk kesempurnaan pelaksanaan Pemilihan Umum nanti.

Pemerintah dan seluruh aparatur penyelenggara Pemilihan Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum di pusat sampai di daerah akan terus melaksanakan persiapan-persiapan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga pada saatnya nanti - tanggal 2 Mei '77 — Pemilihan Umum yang langsung, bebas dan rahasia benar-benar dapat terlaksana dengan aman, tenteram dan tertib.

Marilah kita jadikan Pemilihan Umum yang lima tahun sekali itu yang berjalan tertib dan jujur, yang bebas dan rahasia, tanpa tekanan lahir dan batin, menjadi kebudayaan bare dalam kehidupan politik kita. Pemilihan Umum yang demikian akan memberi kesegaran dan kekuatan bam kepada Bangsa kita untuk tumbuh terus. Dalam arti itu lah Pemilihan Umum 1977 nanti harus berhasil. Dalam arti itu pula MPR baru yang kita bentuk tahun 1978 nanti juga harus berhasil; artinya dapat menggariskan GBHN yang menjamin kelanjutan pembangunan yang dapat makin -membuat Rakyat hidup maju dan sejahtera.

Dengan tekad yang demikian kita akan terus berjalan membangun Bangsa kita di segala bidang.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Seperti telah saya tegaskan di muka tadi, kehidupan konstitusionil itu disatu fihak merupakan salah satu, aspek usaha pembangunan Bangsa — ialah pembangunan di bidang politik —, sedangkan dilain fihak harus mempunyai fungsi yang lebih dalam ialah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa yang makin maju dan sejahtera; singkatnya menjamin usaha melaksanakan pembangunan yang adil dan merata. Dan masalah pembangunan inilah masalah pokok pula yang dihadapi dan diemban oleh Orde Baru. Memang pada pelaksanaan pem-

bangunan Bangsa itu lah letak pengabdian dan dharma bhakti Orde Baru dalam rangka mengisi kemerdekaan kita ini.

Masalahnya adalah bagaimana kita melaksanakan pembangunan Bangsa itu, kemana arahnya dan apa landasannya, bagaimana strateginya agar tujuan dan arah pembangunan itu benar-benar dapat dicapai.

Itu semua telah ada; telah kita miliki, yang sekarang ini kita usahakan sekeras-kerasnya, membanting tulang untuk melaksanakan selurus-lurusnya. Baik arah, landasan, strategi serta pedoman-pedoman umum pelaksanaannya; semuanya telah tercantum dalam GBHN, suatu produk dari lembaga tertinggi, pemegang kedaulatan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai orde yang memegang teguh kehidupan konstitusional, maka GBHN merupakan pegangan dan pedoman pokok dalam melaksanakan tugasnya yang pokok ialah tugas pembangunan.

Dalam GBHN telah ditetapkan arah pembangunan yang kita laksanakan dewasa ini. Dalam rangka Pola Dasar Pembangunan Nasional mengarah pada Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang 25 — 30 tahun dan dengan berpedoman pada Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ke-II, kita laksanakan REPELITA ke-II sekarang ini.

Dalam GBHN juga tampak jelas strategi pembangunan yang harus ditempuh yaitu secara bertahap dan berencana dengan mengambil titik berat pembangunan pada bidang ekonomi tanpa mengabaikan bidang-bidang yang lain, tetapi bahkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang-bidang lainnya itu, khususnya di bidang sosial-budaya. Sedangkan dalam menggarap pembangunan bidang ekonomi, diprioritaskan bidang pertanian dalam arti yang luas mengarah kepada keseimbangan bidang industri dan pertanian pada tahap-tahap berikutnya. Dengan demikian maka arah dan ciri dari pembangunan menurut GBHN adalah meningkatkan kemampuan dan meratakan kemampuan, sesuai dengan tujuan pembangunan Bangsa itu sendiri ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Arah dan ciri pembangunan itu lah — meningkat dan merata — yang harus selalu kita usahakan bersama. Peningkatan dan perataan

itu lah yang dijadikan ukuran apakah pembangunan ini berjalan lurus atau tidak, apakah berhasil atau tidak.

Sudah barang tentu, ukuran penilaian yang kita gunakan haruslah yang wajar, obyektif sejalan dengan tahapan dan kemampuan yang ada, membandingkan keadaan sekarang dengan keadaan yang dahulu serta tanda-tanda arah ke depan. Dengan demikian kita akan memperoleh gambaran apakah dengan pelaksanaan pembangunan itu telah mencapai kemajuan-kemajuan atau sebaliknya atau tetap saja tidak ada perubahan.

Apabila kita perhatikan keadaan kita sekarang dan mengingat kembali keadaan kita sebelum kita melaksanakan pembangunan, apalagi sebelum masa Orde Baru maka saya dapat mengatakan bahwa kita telah banyak mencapai kemajuan. Keadaan kita sekarang sungguh telah meningkat dibandingkan dengan keadaan sebelum Orde Baru dahulu. Pendapatan nasional kita telah meningkat; kemampuan kita meningkat, tingkat kesejahteraan kita meningkat, meskipun kita selalu dihadapkan pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang bertambah pula. Peningkatan keadaan tersebut meliputi back kwalitatif maupun kwantitatif.

Kemajuan-kemajuan yang kita capai itu dapat kita lihat dan kita rasakan di semua bidang kegiatan baik ekonomi maupun, sosial budaya, meliputi; segala macam produksi dan jasa. Ini semua dapat kita buktikan melalui angka-angka statistik berdasarkan penelitian dan riset oleh mereka yang berkompeten yang menunjukkan angka-angka yang selalu menaik.

Ambil saja sebagai contoh pendapatan nasional (GNP), sejak kita melaksanakan pembangunan sampai tahun 1975 setiap tahun telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7%. Apabila dalam tahun 1965 pendapatan nasional kita sebesar Rp. 3.805 milyar, maka dalam tahun 1975 menjadi Rp. 7.768 milyar, suatu kenaikan dua kali lipat. Kenaikan ini menjadi makin menyolok apabila kita bandingkan pada waktu sebelum Orde Baru yang pada tahun 1960 sampai tahun 1965 hanya mengalami kenaikan sebesar 1,7% rata-rata setahun.

Mengenai pendapatan setiap penduduk (income per capita) juga telah tercatat kenaikan yang cukup besar dalam 10 tahun terakhir ini, ialah jika dalam tahun 1965 sebesar Rp. 36.800,— (US \$ 89, —) maka dalam tahun 1975 telah naik menjadi Rp. 59.000,— (US \$143,—).

Dengan mengemukakan angka-angka itu, tidak berarti bahwa pembangunan kita hanya sekedar mengejar pendapatan nasional atau pendapatan rata-rata penduduk. Angka-angka tersebut hanya sebagai ukuran nyata dan obyektif bahwa kita telah mencapai hasil dari pembangunan yang kita laksanakan itu. Memang, pendapatan nasional yang naik belum berarti meratanya perbaikan kehidupan semua anggota masyarakat. Dan meratanya perbaikan semua anggota masyarakat ini yang menjadi tujuan pokok pembangunan kita.

Kenyataan-kenyataan kemajuan itu juga dapat kita rasakan dan kita lihat sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan saja di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tetapi juga di kota-kota kecil dan terutama di kebanyakan desa-desa di seluruh Indonesia ini. Sesungguhnya seluruh lapisan masyarakat telah mengalami dan menikmati hasil-hasil pembangunan ini, karena memang makin luas rakyat yang turut serta dan bekerja untuk berhasilnya pembangunan ini.

Kenyataan kemajuan-kemajuan itu dapatlah ditunjukkan antara lain: keadaan pangan dewasa ini telah lebih baik dan lebih mudah didapat oleh rakyat banyak, terutama karena kita telah berhasil meningkatkan produksi beras dan palawija. Dan ini dimungkinkan karena kita telah melaksanakan dengan sungguh-sungguh BIMAS dan INMAS yang setiap tahun selalu kita tingkatkan. BIMAS dan INMAS itu hanya mungkin berhasil apabila kita mampu menyediakan sarana dan prasarananya dan berhasil mendorong para petani untuk melakukan intensifikasi itu dengan berbagai rangsangan, bimbingan dan penyuluhan. Dan memang kita telah menyelesaikan banyak proyek-proyek bendungan dan irigasi, telah menemukan dan memperbanyak bibit-bibit unggul, telah berhasil menyediakan pupuk — yang sebagian telah kita hasilkan sendiri — dan obat-obat pembasmi hama. Pada tahun yang lalu di beberapa daerah telah terjadi eksplosi hama

yang sangat merugikan. Syukur, bahwa berkat tindakan cepat untuk memberantasnya dewasa ini telah dapat diatasi. Untuk mendorong dan merangsang petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya berbagai langkah yang tepat telah diusahakan, seperti pemberian kredit BIMAS, penentuan harga dasar, menyediakan tenaga-tenaga penyuluh pertanian, memberikan subsidi harga pupuk dan sebagainya. Langkah-langkah ini kita ambil dan akan terus kita lakukan karena memang prioritas pembangunan kita adalah bidang pertanian dengan sasaran untuk meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus meningkatkan pendapatan dan tingkat hidup puluhan juta petani, sehingga menyangkut kepentingan Rakyat banyak.

Marilah kita perhatikan manfaatnya yang dinikmati oleh para petani dari hasil usaha peningkatan produksi pangan ini. Dengan adanya bendungan-bendungan dan irigasi, maka di samping mengurangi bahaya banjir, Pak Tani dapat memperoleh dua kali panen dan sekali palawija dalam setahun, sedangkan hasilnya setiap panen lebih banyak, karena dapat disediakan sarana produksi yang cukup: pupuk bibit unggul, obat-obatan. Dengan demikian penghasilan Pak Tani pertahun jauh meningkat, bukan saja karena produksinya meningkat, tetapi harga jualnya dilindungi.

Oleh karena itu adalah tidak mengherankan apabila dewasa ini di desa-desa telah banyak Pak Tani yang memiliki sepeda, sepeda motor, radio transistor, jam tangan, bahkan juga kendaraan mobil seperti pick up dan lain-lain. Makin banyak rakyat desa yang mampu naik haji, memperbaiki rumahnya dan sebagainya. Bukankah ini salah satu tanda kemajuan dan pemerataan pembangunan.

Keadaan sandang juga semakin baik, tidak merupakan masalah yang rumit lagi, bahkan dewasa ini dapat dikatakan telah dapat swasembada, dihasilkan oleh pabrik-pabrik di dalam negeri sendiri. Memang dalam beberapa tahun ini saja di Indonesia telah berdiri ber-puluh-puluh pabrik tekstil yang dapat menghasilkan lebih dari satu milyar meter tekstil, terutama tekstil yang diperlukan dan dapat dibeli oleh Rakyat banyak.

Keadaan perhubungan baik melalui darat, laut maupun udara telah lebih leluasa, lancar dan cepat, tidak saja perhubungan antara kota-kota besar, antara Ibu-ibu Kota Propinsi tetapi juga dengan kota-kota kecil yang tadinya terpencil, dewasa ini telah dapat dihubungi lebih cepat dan lebih teratur. Ini dimungkinkan sebagai hasil dari semakin baiknya prasarana perhubungan dan makin banyaknya jumlah alat angkutan: pembangunan dan perbaikan jalan-jalan, jembatan-jembatan, rel-rel kereta api, pembangunan lapangan-lapangan terbang, pelabuhan-pelabuhan dan pusat-pusat telepon yang dapat menghubungkan jarak jauh seperti microwave dan satelit domestik yang baru tadi pagi diresmikan penggunaannya. Demikian pula karena makin banyak dapat diproduksi/dirakit kendaraan bermotor, sedangkan armada angkutan udara dan laut kita juga bertambah. Dengan makin mudah, luas dan cepatnya hubungan dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Nusantara ini, bukan saja akan memperlancar arus perdagangan dan kegiatan ekonomi Indonesia, tetapi juga akan makin meratakan gerak pembangunan dan akan makin kokoh kesatuan dan keutuhan wilayah Nusantara ini, yang akan memperkokoh ketahanan nasional.

Dengan adanya sistim komunikasi satelit domestik — yang kita beri nama Satelit PALAPA — maka bukan saja hubungan jarak jauh kita akan dapat berlangsung lebih cepat dan terang, tetapi juga akan memberikan jangkauan siaran-siaran radio dan televisi yang lebih luas dan terang sehingga perluasan kegiatan penerangan dan pendidikan dapat dilakukan. Saya sampaikan penghargaan yang besar kepada semua pihak yang telah dapat menyelesaikan proyek PALAPA ini tepat pada waktunya.

Dewasa ini makin banyak orang yang dapat menikmati penerangan listrik dan air minum yang bersih di rumah-rumah mereka, sedangkan penyediaan rumah yang sederhana juga telah mulai kita garap dengan sungguh-sungguh. Ini dimungkinkan karena telah banyak dibangun pusat-pusat listrik dan penjernihan air minum, yang besar atau yang kecil, sedangkan penyediaan bahan perumahan yang lebih murah juga terus diusahakan. Produksi semen terus meningkat, pabrik-pabrik kayu gergaji, kayu lapis, papan partical, telah bermunculan; demikian pula pabrik sang dan besi baja.

Pembangunan di luar bidang ekonomi juga banyak mengalami kemajuan dan pemerataan; baik di bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perluasan lapangan kerja, kehidupan keagamaan dan sebagainya.

Banyak gedung-gedung sekolah Dasar, sekolah lanjutan dan kampus-kampus baru telah mulai kita bangun, sedang yang lama banyak yang dapat diperbaiki. Peralatan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi juga bertambah baik. Perbaikan sarana dari mutu pendidikan itu terus kita usahakan, pada tingkat Sekolah Lanjutan Atas, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah-sekolah Kejuruan. Tidak sedikit buku-buku pelajaran, alat-alat peragaan dan perpustakaan-perpustakaan telah disediakan oleh Pemerintah untuk segala tingkat sekolah. Semuanya itu dibarengi dengan penataran guru-guru, sehingga mutu pendidikan diharapkan juga makin meningkat. Mengenai mutu pendidikan ini merupakan salah satu tantangan yang masih harus kita pecahkan. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana kita benar-benar dapat mengisi pendidikan dengan moral Pancasila seperti yang telah ditegaskan dalam GBHN.

Walaupun berbagai langkah penting telah kita ambil, namun masih tetap terasa kebutuhan akan pendidikan yang belum sepadan dengan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan gejala yang baik; karena majunya pembangunan telah membuat masyarakat makin haus akan pendidikan.

Karena itu Pemerintah berusaha agar kesempatan memperoleh pendidikan terus meluas.

Sepadan dengan kemampuan yang tersedia, maka untuk tahun pelajaran yang akan datang Pemerintah akan menghapuskan sebagian beban yang dirasakan berat oleh jutaan orang tua dan acapkali menimbulkan kericuhan di lapangan pendidikan.

Sekarang saya dapat mengumumkan bahwa mulai tahun pelajaran yang akan datang SPP untuk Sekolah Dasar mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 dihapuskan.

Ini adalah langkah kecil tetapi mempunyai arti yang besar.

Saya katakan langkah kecil, sebab beban orang tua baru sebagian kecil yang dapat diringankan.

Saya katakan mempunyai arti besar karena dengan langkah itu kita mulai mampu melaksanakan salah satu jalan pendidikan ke arah yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran. Pasal ini memberi isyarat kepada kita bahwa dalam jangka panjang negara lah yang harus menyediakan pendidikan secara cuma-cuma kepada setiap warganegaranya. Tetapi itu belum mungkin terwujud seluruhnya sekarang. Tetapi kita akan mengarah ke sana.

Penghapusan SPP untuk Sekolah Dasar merupakan langkah awal yang penting ke arah itu. Penghapusan SPP seperti ini mengandung sifat kerakyatan daripada pembangunan kita, sebab justru pada tingkat Sekolah Dasar itu sebagian terbesar dari anak-anak kita mulai memasuki alam pendidikan dan pengajaran. Adalah keliru dan malahan merugikan perkembangan Bangsa kita kelak, apabila di antara tunas-tunas bangsa itu ada bakat yang terpendam yang tidak dapat muncul hanya karena orang tua mereka tidak mampu. Di samping itu penghapusan SPP tadi walau baru sampai dengan kelas 3 — akan dapat mendorong pelaksanaan kewajiban belajar. Setidak-tidaknya, rintangan tidak dapat memenuhi kewajiban belajar karena orang tua tidak mampu membayar SPP telah dapat kita singkirkan sebagian.

Dengan demikian, meskipun baru pada tahap awal namun asas pemerataan kesempatan pendidikan telah kita perluas. Dengan segala kemampuan yang ada pada kita sejak tahun 1974 yang lalu setiap tahunnya dilakukan pembangunan dan perbaikan ribuan gedung-gedung Sekolah Dasar, yang akan kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan dengan usaha itu pun, pada akhir REPELITA II nanti, baru 85% ;raja anak-anak kita yang berumur 7 — 12 tahun akan tertampung di Sekolah Dasar. Gambaran ini menunjukkan betapa besar tantangan yang harus kita atasi.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Walau pembangunan baru berjalan sekitar 8 tahun namun ternyata telah menyebabkan pertumbuhan badaniah orang Indonesia yang bertambah baik. Remaja-remaja kita lebih tinggi dan lebih se-

hat badannya dari orang-orang tua mereka. Dalam sepuluh tahun terakhir umur rata-rata orang Indonesia lebih panjang. Angka kematian pada semua tingkat umur juga bertambah kecil. Ini juga merupakan pertanda bahwa kehidupan dan syarat kehidupan kita selama pembangunan ini telah lebih baik.

Semuanya itu berkat mutu makanan masyarakat kita mulai lebih baik di samping langkah-langkah lain berupa pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit menular dan pemeliharaan kesehatan lainnya. Selama ini banyak rumah-rumah sakit baru telah kita dirikan, telah banyak diperbaiki dan diperluas rumah-rumah sakit yang lama, dokter-dokter dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya makin banyak dan makin menyebar ke daerah. Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat telah ada di mana-mana. Obat-obatan juga tersedia makin banyak. Pengertian mengenai kesehatan dan hidup sehat makin mendalam di kalangan masyarakat desa dengan adanya jamban-jamban keluarga, perbaikan kampung, pemugaran desa dan langkah-langkah lainnya. Semuanya itu merupakan langkah-langkah awal yang penting untuk menjadikan kesehatan dan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kita, sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Usaha yang juga penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pelaksanaan program Keluarga Berencana. Tujuan pokok dari program ini adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yang akhirnya akan menjadi masyarakat sejahtera.

Enam tahun yang lalu kita mulai melaksanakan program ini. Sekarang hasilnya cukup menggembarakan : 6,8 juta peserta mengikuti program ini. Yang paling membesarkan hati adalah bahwa 7 di antara 10 peserta Keluarga Berencana adalah petani dan masyarakat desa. Di samping itu di kalangan suami-isteri yang berusia muda dan mereka yang berkeluarga kecil makin banyak yang mengikuti program ini. Semuanya itu merupakan tanda-tanda yang baik bahwa program Keluarga Berencana ini benar-benar diterima dengan kesadaran oleh lapisan terbesar masyarakat kita.

Bersamaan dengan itu juga timbul tantangan bagaimana agar kehidupan lahir yang bertambah baik tadi selalu kita imbangi dengan kehidupan rokhani yang lebih kuat.

Bagi kita, pembangunan ini berarti gagal bukan saja jika kita gagal membangun segala sesuatu yang serba benda; akan tetapi juga akan gagal sekiranya pembangunan yang serba benda itu berhasil namun kita tidak berhasil membangun rokhani kita.

Pembangunan memang berarti modernisasi, dalam arti pembaharuan yang terus menerus. Tetapi harus jelas bagi kita bahwa modernisasi tidak berarti "pemerataan", tidak berarti kita meniru-niru pola kehidupan bangsa lain.

Pembangunan berarti memajukan Indonesia yang tetap berkepribadian Indonesia. Jelasnya, kita mengembangkan pola kehidupan Bangsa kita sendiri dalam suasana yang makin maju. Dalam kemajuan itu kita tetap berpijak pada bumi budaya Bangsa kita sendiri.

Karena itu kita akan terus membangun Bangsa ini tanpa meninggalkan warisan budaya Bangsa kita yang justru menyatakan kepribadian nasional kita sebagai Bangsa Indonesia.

Ada arus pokok yang sangat membesarkan hati dalam memelihara warisan budaya Bangsa sendiri itu. Dalam suasana di mana persatuan dan rasa kesatuan Indonesia makin kuat, dalam suasana sekat-sekat kesukuan makin menipis, maka di mana-mana usaha menggali kembali dan mempelajari kebudayaan dan kesenian daerah justru bertambah mekar selama sepuluh tahun terakhir ini. Masyarakat Ibukota memiliki Pusat Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki yang makin terkenal di kalangan seniman dan masyarakat luas; juga dikenal oleh dunia luar. Di daerah-daerah tumbuh kegiatan dan tempat-tempat serupa. Kita memang perlu memiliki pusat pengembangan kebudayaan yang tersebar di daerah-daerah. Semuanya itu merupakan tanda-tanda bahwa dalam kiprahnya pembangunan lahir maka kebutuhan rokhani pun tidak kita abaikan; malahan makin dapat kita nikmati. Pemerintah menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat yang telah mengambil prakarsa mengembangkan kesenian dan kebudayaan ini, yang telah mengisi kekosongan-kekosongan pembangunan kita yang dewasa ini belum mampu digarap sepenuhnya oleh Pemerintah.

Di samping pengembangan kebudayaan nasional, maka rasa keagamaan yang kuat pada Bangsa kita sungguh merupakan kekuatan

penting dalam pembangunan lahir batin. Pembangunan kita harus memanusiakan manusia. Dalam jaman pembangunan- dengan perubahan-perubahan yang serba cepat sekarang dan di masa-masa datang itu, di mana teknologi datang dengan membawa perubahan dalam pandangan-pandangan manusia dan tata nilainya, maka bimbingan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa sungguh merupakan sandaran batin yang paling kokoh. Kita merasa bersyukur bahwa dari tahun ke tahun rasa keagamaan Bangsa kita bukan dilunturkan oleh kemajuan-kemajuan tadi, melainkan malahan bertambah kuat. Tidak sedikit rumah-rumah ibadah, madrasah-madrasah dan pondok pesantren yang telah didirikan dan diperbaiki, yang satu lebih indah dari yang lain, yang satu lebih besar dari yang lain: bermunculan tersebar di kota-kota besar, di kota-kota kecil sampai ke desa-desa. Makin berduyun-duyun pula orang datang ke tempat-tempat ibadah, dan yang lebih menggembarakan lagi di antara jemaah makin banyak anak-anak dan remaja kita. Kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun terus bertambah. Apabila dahulu hanya dengan kapal laut, maka sekarang dengan pesawat-pesawat terbang. Semuanya itu menandakan bertambah berkembangnya kehidupan agama selama pembangunan ini; di samping menunjukkan bahwa kehidupan memang bertambah baik.

Makin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan. Tanggung jawab sosial pemuka-pemuka agama pun bertambah besar.

Pemuka-pemuka agama harus berusaha memahami lebih teliti lagi tantangan-tantangan sosial budaya yang terbawa oleh kemajuan pembangunan tadi. Para pemuka agama harus berusaha membaca secermat-cermatnya arah, wujud dan akibat-akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang disebabkan oleh usaha kita sendiri maupun yang disebabkan oleh hubungan kita dengan dunia luar, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan tidak sesuai dengan rasa dan nilai budaya kita. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat kerukunan hidup dan sating menghormati antara

pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, karena kita adalah satu keluarga besar Bangsa Indonesia, yang kelahirannya kita anggap sebagai rahmatNya kepada kita semua. Saya bersyukur dan berbesar hati bahwa pertemuan-pertemuan dan konsultasi-konsultasi di antara pemuka-pemuka berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa telah mulai berjalan, untuk menggalang saling pengertian dan saling menghormati dalam rangka mempertebal keimanan agama/kepercayaannya yang diyakini masing-masing dan dalam rangka memperbesar sumbangan para ulama kepada perjuangan Bangsa. Adalah tugas kita bersama, tugas semua ummat beragama Indonesia, untuk memelihara dan mensyukuri rahmat itu dengan persatuan dan pembangunan.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati;

Salah satu sasaran yang penting dari pembangunan kita adalah perluasan lapangan kerja. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dengan bertambah majunya kehidupan ekonomi dan pembangunan, dengan beribu-ribu proyek-proyek pembangunan besar maupun kecil yang kita bangun — baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat — maka lapangan kerja telah makin meluas.

Di samping tenaga kerja yang secara langsung tertampung, maka tidak sedikit jumlahnya tenaga kerja musiman yang memperoleh penghasilan atau tambahan penghasilan. Tentu saja tenaga kerja yang lebih trampil akan mendapat kesempatan kerja yang lebih besar. Karena itu Pemerintah terus memperluas pusat-pusat pendidikan ketrampilan ini. Pendidikan ketrampilan dan keahlian memang sangat kita perlukan untuk gerak pembangunan yang meningkat di masa datang, terutama karena kita harus menuju ke industri besar-besaran. Untuk itu proses pengindonesiaan di perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan gabungan perlu terus diusahakan agar semakin cepat. Tujuan perluasan lapangan kerja adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan. Dalam rangka itu lah dewasa ini Pemerintah sedang mempersiapkan peraturan untuk makin memperbaiki jaminan kesejahteraan buruh/karyawan; antara lain mengenai keharusan adanya ikatan kerja, hak menerima pensiun bagi buruh/karyawan atau jandanya,

atau yatim piatunya, tabungan hari tua, uang jaminan kematian sebelum pensiun dan sebagainya. Dana untuk jaminan kesejahteraan buruh itu dihimpun bersama oleh perusahaan dan buruh. Diharapkan peraturan itu akan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Usaha lain untuk memperluas kesempatan kerja telah banyak kita lakukan dengan transmigrasi, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang masih sangat kurang di daerah-daerah di luar Jawa dan Bali. Kekayaan alam dan tanah-tanah luas di luar pulau Jawa dan Bali hanya dapat digali dan digarap dengan tenaga kerja yang cukup. Demikianlah kita telah membuka daerah persawahan pasang surut di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah, di Riau, di Jambi, di Sumatera Selatan dan di daerah-daerah lainnya. Di masa-masa datang, sepadan dengan kemampuan negara dan meluasnya pusat-pusat pembangunan di luar Pulau Jawa, maka gerak transmigrasi ini akan terus kita perbesar, baik transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Transmigrasi spontan oleh masyarakat sendiri.

Usaha transmigrasi, tahun ini dipusatkan pada penyiapan tanah-tanah yang akan diperuntukkan bagi transmigran, agar para transmigran apabila nanti tahun depan dan seterusnya — datang di tempat yang baru, mendapatkan tanah yang benar-benar telah siap untuk dihuni dan dikerjakan untuk hidup yang lebih baik.

Pembangunan nasional ini tidak akan merata apabila Daerah-daerah tidak bangun dan tidak dibangun. Oleh karena itu, pembangunan Daerah merupakan salah satu usaha pembangunan yang sangat pokok. Dengan melaksanakan pembangunan di setiap Daerah yang berhasil, maka akan terbinalah ketahanan nasional dan sekaligus merupakan usaha untuk memberi isi kepada Wawasan Nusantara; yang akan menjadikan Indonesia kita menjadi kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan kebudayaan dan kesatuan pertahanan keamanan yang bulat dan kokoh. Pembangunan Daerah itu memang telah berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah sendiri. Saya ingatkan di sini bahwa Daerah hendaknya membangun dirinya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya itu; jangan

begitu saja meniru-niru Daerah lain yang mungkin berlainan kemampuan dan kebutuhannya.

Sejak semula proyek-proyek pembangunan memang telah kita sebarkan ke semua Daerah. Sedangkan Daerah sendiri pun telah memperbesar kemampuannya. Tetapi itu saja belum cukup. Karena itu lah setiap Propinsi, setiap Kabupaten dan setiap Desa mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat untuk menambah kekuatan bagi pembangunan daerahnya masing-masing.

Ini pantas kita catat sebagai kemajuan Orde Baru, Orde Pembangunan. Selama Indonesia merdeka bare dalam masa Orde Baru ini lah setiap desa mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat agar setiap desa dapat lebih membangun masyarakatnya.

Pembangunan yang dibiayai dari bantuan Pemerintah ini lah yang dinamakan oleh masyarakat "Proyek-proyek Inpres Rakyatlah — terutama mulai rakyat desa yang memberi nama "Proyek Inpres" itu.

Proyek-proyek Inpres ini sama sekali bukan seperti "Proyek Mandataris" jaman Orde Lama dahulu. Seperti para Anggota Dewan yang terhormat tentunya telah mengetahui, biaya yang tersedia bagi Proyek-proyek Inpres tadi juga tercantum dengan terang dalam Undang-undang APBN merupakan proyek-proyek dan program-program yang penting dan mendapatkan prioritas. Dalam Undang-undang APBN itu namanya cukup panjang, seperti Program Bantuan Pembangunan SD, Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Program Bantuan Pembangunan Desa, Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Program Bantuan Pembangunan dan Pemugaran Pasar, Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dan sebagainya. Pelaksanaan program-program bantuan itu lah yang diatur dengan Instruksi Presiden.

Sekali lagi, Instruksi Presiden adalah bentuk wajar dalam tata peraturan perundang-undangan kita, dalam tata pengendalian pemerintahan. Apabila suatu pelaksanaan program Pemerintah diatur dengan Instruksi Presiden, maka tujuannya tidak lain agar bantuan tadi digunakan secara semestinya untuk membiayai program-program yang mendapatkan prioritas dan dikerjakan di semua daerah. Tujuannya

adalah agar pembangunan ini sungguh-sungguh merata, membangkitkan kemampuan Daerah, merangsang kegotong-royongan masyarakat desa, memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak kita, meningkatkan kesehatan dan kebersihan masyarakat desa; melestarikan lingkungan dan kekayaan alam, memperluas lapangan kerja, memperlancar dan menggairahkan perdagangan dan perekonomian di kota-kota kecil, kesemuanya itu; adalah menyangkut kepentingan Rakyat banyak dan Rakyat kecil.

Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Usaha penting yang erat hubungannya dengan pembangunan masyarakat desa dan amat penting dalam rangka meratakan pembagian penghasilan para petani dari Jerih payahnya sendiri adalah penyusunan dari pembentukan Badan-badan Usaha Unit Desa atau disingkat BUUD. Langkah ini telah kite mulai beberapa tahun yang lalu. Saya tidak akan jemu-jemu menjelaskan masalah BUUD ini, karena BUUD adalah pendorong dan penggerak bagi tegaknya koperasi-koperasi di desa-desa yang harus menjadi salah satu sokoguru ekonomi nasional kita. Setiap BUUD yang sudah mulai jalan, sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh Rakyat desa, harus terus diarahkan agar bentuk dan isi Badan Usaha tersebut menjadi Koperasi Unit Desa.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa perekonomian kita harus kita susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa demokrasi ekonomilah yang harus kita tegakkan. Setiap warga desa turut memiliki usaha-usaha yang mereka kerjakan bersama, mereka nikmati bersama serta memperoleh keuntungan bersama. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Untuk melaksanakan tata perekonomian yang demikian itu, maka koperasilah yang paling sesuai, koperasi yang benar-benar memberi manfaat kepada anggota-anggotanya.

Karena itu koperasi harus kita bina dan kita tumbuhkan. Ini tidak dapat hanya dengan anjuran, tetapi harus dengan bimbingan dari bukti. Itu lah sebabnya bermilyar-milyar rupiah telah disalurkan melalui BUUD/KUD kepada petani yang jutaan jumlahnya, berupa

pemberian kredit Bimas, kredit pengadaan padi/beras, kredit pengadaan sarana produksi seperti gudang/penggilas padi dan sebagainya, dan nantinya juga kredit candak kulak dan lain-lain.

BUUD adalah kekuatan penggerak koperasi! Koperasi yang kita tumbuhkan pada dasar-desanya masyarakat kita, ialah masyarakat petani, masyarakat desa. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga kader koperasi dan pimpinan usaha dalam jumlah yang besar.

Sekarang ini telah tumbuh 3.500 BUUD tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya. Sebagian dari jumlah itu telah menjadi Koperasi Unit Desa. Pada permulaan BUUD memang bam menangani masalah pangan, khususnya peningkatan produksi padi melalui kegiatan Bimas. Tetapi lambat lawn, BUUD harus tumbuh menjadi Koperasi Unit Desa yang dapat melayani segala kegiatan produksi, distribusi dan peningkatan kegiatan-kegiatan lain dari masyarakat desa.

Akan tiba saatnya nanti: setiap orang di desa akan menjadi anggota Koperasi Unit Desa karena KUD memang dapat memberikan manfaat kepada anggota di desanya: melayani kebutuhan produksi, menampung hasil produksinya dan memberikan keuntungan yang wajar dan adil kepada setiap petani. Dan jika puluhan ribu desa-desa kita telah tumbuh dengan kekuatan koperasi desa itu, apabila berjuta-juta orang desa telah menjadi anggota koperasi desa yang kuat itu, maka sungguh, koperasi akan menjadi sokoguru yang kokoh dari bangunan ekonomi nasional kita. Ke sanalah kita akan bergerak!

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Saya telah mengajak kita semua untuk melihat garis besar dan arah pembangunan yang selama ini kita kerjakan. Tampak bahwa pembangunan telah mengarah kepada kemajuan dan pemerataan.

Tetapi ada pertanyaan pokok yang harus kita jawab: apakah kemajuan-kemajuan tadi berkat cururan keringat kita sendiri, apakah kemajuan-kemajuan tadi berkat kemampuan kita yang bertambah besar. Jawaban atas pertanyaan pokok itu antara lain dapat kita lihat dalam perkembangan APBN sejak kita bertekad untuk memantapkan stabilitas ekonomi dan mulai menggerakkan pembangunan yang menjadi sasaran utama Orde Baru.

Gambaran kemajuan memang segera tampak, karena dari tahun ke tahun APBN selalu meningkat, baik anggaran rutin maupun dan terutama anggaran pembangunan. Dibanding dengan ketika kita mulai melaksanakan REPELITA I pada tahun 1969 dahulu maka besarnya APBN sekarang ini telah naik lebih 10 kali lipat.

Penerimaan Negara telah naik dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk memikul beban pembangunan bertambah besar. Penerimaan dari pajak, bea masuk dan lain-lain terus naik. Ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat juga bertambah besar. Pemerintah terus berusaha agar pajak dan bea masuk juga makin adil, artinya yang mampu harus memberi iuran yang lebih besar kepada pembangunan.

Asas keadilan ini lah yang juga dijadikan landasan oleh Pemerintah dalam usahanya untuk memperbesar penerimaan negara dari minyak bumi. Yang saya maksudkan adalah untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar dari hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan asing yang menggali minyak bumi di sini, baik berdasarkan kontrak karya, maupun kontrak bagi hasil.

Kita selalu bersyukur bahwa Tuhan mengaruniai kita kekayaan alam berupa minyak.

Minyak bumi itu harus kita gali dari bumi dan dari daerah-daerah lepas pantai kita. Namun kemampuan kita masih terbatas, karena itu kita masih memerlukan modal dan keahlian dari luar. Dalam rangka ini lah Pemerintah mengadakan perjanjian kontrak karya maupun kontrak bagi hasil dengan pengusaha-pengusaha minyak luar negeri.

Tetapi sebagai negara yang berdaulat, maka kita juga berhak menerima pembagian hasil atau keuntungan yang lebih adil dari hasil produksi atau keuntungan dari perusahaan-perusahaan minyak asing yang kita beri kesempatan untuk menggali kekayaan alam kita yang sangat penting itu. Asas keadilan yang menjadi landasan tata ekonomi nasional kita itu lah yang kita perjuangkan; dan perjuangan ini sejalan dengan perjuangan besar membangun Tata Ekonomi Baru .Dunia yang kumandangnya sekarang menggema di segenap penjuru dunia.

Saya bersyukur dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pengusaha minyak asing, yang setelah mengadakan pembicaraan secara mendalam dalam waktu yang cukup panjang dengan penuh pengertian dan bersedia memenuhi apa yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia, ialah menaikkan bagian penerimaan bagi Pemerintah, sehingga pembagian itu menjadi lebih adil.

Semoga kerjasama dan saling pengertian ini akan merupakan landasan bagi kelanjutan kerjasama yang adil dan saling memberikan keuntungan.

Perlu saya tegaskan di sin: bahwa usaha kita untuk memperoleh bagian yang adil dari minyak bumi ini sama sekali tidak merobah sikap kita terhadap penanaman modal asing dan penyertaan modal asing dalam pembangunan Indonesia. Kita tetap membuka pintu pada penanaman modal asing, yang memang masih kita perlukan dan tetap memberikan kesempatan untuk mempunyai usaha yang baik, yang menjamin keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak; pengusaha asing dan Rakyat Indonesia.

Dalam pada itu usaha lain untuk memperbesar penerimaan Negara, baik berupa rupiah maupun berupa devisa, terus kita tingkatkan. Untuk itu ekspor terus kita galakkan. Tahun yang lalu ekspor kita memang mengalami kemunduran, sebagai akibat resesi dunia. Tetapi mulai bulan April yang lalu kita bertekad dan mengambil berbagai langkah-langkah untuk menggalakkan lagi ekspor kita. Berbagai jalan telah kita tempuh misalnya dengan menurunkan biaya dalam negeri — khususnya meniadakan pungutan-pungutan dan biaya-biaya yang tidak ada sangkut paut dengan pemasaran barang-barang ekspor —, meringankan biaya modal dengan menurunkan suku bunga dan unsur-unsur bunga lainnya.

Pasaran juga kita perluas, baik pasaran minyak maupun pasaran ekspor barang bukan minyak. Hasil usaha-usaha tadi membesarkan had, jumlah dan nilai ekspor kita tahun ini — sampai sekarang — mulai naik lagi.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, maka untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan, kita terima bantuan dari luar negeri sebagai komponen pelengkap kemampuan kita. Kita juga mengundang penanam-penanam modal asing untuk berusaha di sini. Jumlah -bantuan luar negeri itu benar meningkat dari tahun ke tahun, tetapi dibandingkan dengan kemampuan kita sendiri, maka relatif menurun.

Tekad dan arah kita untuk pada akhirnya nanti kita memikul sendiri seluruh beban pembangunan tetap kita pegang teguh; dan usaha kita telah menunjukkan hasilnya. Jika pada permulaan REPELITA I dahulu 80% dari biaya pembangunan berasal dari bantuan luar negeri, maka sekarang bagian jumlah itu telah menurun menjadi 35% saja. Ini menunjukkan bahwa arah yang kita tempuh telah benar. Dan juga menunjukkan bahwa kemampuan kita memikul sendiri beban pembangunan bertambah besar. Dalam tahap-tahap berikutnya bagian dari bantuan luar negeri. itu akan terus menurun, hingga akhirnya tidak-kita perlukan lagi bantuan luar negeri.

Untuk kesekian kalinya, Saudara Ketua, says perlu menerangkan masalah pinjaman luar ,negeri dan penanaman modal asing.

Kita perlu menjernihkan lagi pikiran kita mengenai masalah-masalah itu, karena is merupakan bagian dari pada siasat pembangunan. Kita perlu jelas mengenai masalah ini karena is menyangkut rasa kebangsaan dan kebanggaan kita sebagai Bangsa yang merdeka!

Baiklah kita camkan: kita tidak perlu kehilangan harga diri dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dengan menerima bantuan dari negara lain! Banyak bangsa-bangsa yang kini maju dan merasakan kesejahteraan umum; juga telah membangun kembali dari puing-puing keruntuhannya, dengan bantuan luar negeri. Dan jangan juga kita lupakan bahwa kerjasama antara negara dan bantu-membantu itu telah merupakan pola umum tata hubungan antara bangsa semenjak Perking Dunia ke II berakhir.

Pembangunan memerlukan modal, ketrampilan dan teknologi; yang semuanya itu belum cukup kita miliki dewasa ini; lebih-lebih

belum cukup untuk mempercepat pembangunan kita. Di lain pihak masalah yang kita hadapi masih cukup besar. Karena itu kita terima bantuan dari luar agar pembangunan dapat kita percepat dan agar kita pada akhirnya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri.

Seperti kita semua telah tahu bahwa sejak tahun 1967 kita telah menerima bantuan ekonomi dari sejumlah negara dan badan-badan internasional yang tergabung dalam IGGI dengan syarat-syarat yang lunak. Memang, negara-negara IGGI itu tergolong negara Barat. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita berkiblat ke sana. Lebih-lebih tidak berarti bahwa kita melepaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Kita terima bantuan dari IGGI karena syarat-syarat lunak itu hanya mereka yang dapat memberikan. Negara-negara sosialis misalnya, waktu itu tidak mau memberikan syarat-syarat yang selunak itu. Dalam tahun belakangan ini, setelah ekonomi kita makin kuat dan pembangunan mulai lancar, kita berkesempatan untuk menggunakan pinjaman dengan syarat-syarat yang kurang lunak dan pinjaman komersial. Karena itulah kita mulai menggunakan pinjaman dari negara-negara sosialis dan negara-negara Timur Tengah.

Jelasnya, bagi kita bantuan ekonomi luar negeri adalah masalah ekonomi, bukan masalah politik. Dan yang penting, bantuan ekonomi itu hanya kita terima apabila memenuhi tiga faktor, tiga syarat; ialah : pertama, bantuan tidak boleh disertai ikatan politik yang membelenggu gerak kita; kedua, bantuan harus digunakan sesuai dengan rencana pembangunan kita, artinya kita sendiri yang menentukan penggunaannya; dan ketiga: bantuan kita terima dengan memperhatikan kemampuan kita untuk membayar kembali.

Untuk itu setiap pinjaman yang kita terima haruslah dapat digunakan untuk mendorong produksi dan menghasilkan jumlah yang lebih besar dari jumlah pinjaman tersebut, sedangkan pengembalian keseluruhan jumlah pinjaman tadi tidak boleh mengganggu atau mengurangi kemampuan kita sendiri dalam meneruskan pembangunan, apalagi membebani anak cucu kita di masa datang. Karena itu, pinjaman-pinjaman luar negeri semuanya kita gunakan untuk membangun proyek-proyek pembangunan, dan syarat-syaratnya harus lunak,

setidak-tidaknya — sekarang — jangka waktu pengembaliannya harus cukup panjang.

Pinjaman jangka panjang kite gunakan untuk membangun proyek jangka menengah atau jangka pendek, agar segera membawa hasil. Dan jika kita telah menikmati hasil pembangunan itu, barulah kita mengangsur pinjaman tadi secara ringan. Angsuran itu kita bayar dari hasil proyek tadi.

Itu lah sebabnya kite meminta syarat bantuan yang pengembaliannya berjangka panjang: agar dapat kita "jereng", agar dapat kita rentang, sehingga angsurannya seringan mungkin. Dan karena pembayaran dilakukan setelah proyek memberi hasil, maka generasi yang akan datang hanya membayarnya dengan hasil proyek itu.

Para ahli ekonomi telah menyimpulkan, bahwa angsuran pinjaman itu cukup aman apabila jumlahnya tidak melebihi 20% dari seluruh penerimaan devisa kita setiap tahun. Dan pinjaman-pinjaman kita memang telah kita batasi sendiri dalam batas-batas pengamanan tadi.

Perjanjian-perjanjian bantuan luar negeri yang telah dibuat oleh Pemerintah hingga saat ini meliputi jumlah US \$ 10,8 milyar; di antaranya sebesar US \$ 2,5 milyar merupakan bantuan luar negeri yang diterima sebelum masa Orde Baru. Perjanjian bantuan luar negeri yang kita buat selama Orde Baru berjumlah US \$ 8,3 milyar; yang terdiri dari US \$ 7,9 milyar pinjaman dan US \$ 0,4 milyar berupa "grant". Angka tadi baru merupakan perjanjian; belum seluruhnya kita gunakan, antara lain karena masih dalam persiapan pelaksanaannya. Jumlah bantuan yang benar-benar telah kita gunakan ditambah dengan bunga-bunganya sampai saat sebesar US \$ 6,7 milyar. Dan jumlah itu US \$ 2,1 milyar adalah sisa hutang yang dibuat sebelum Orde Baru.

Seperti kita ketahui, sebagai hasil perundingan-perundingan yang dilakukan, maka dalam tahun 1970 telah dicapai persetujuan bahwa hutang lama dapat diubah dan diperpanjang pengembaliannya hingga jangka waktu 30 tahun. Dengan demikian beban pelunasan hutang lama itu telah dapat diperingan sekali.

Bantuan luar negeri sejak masa Orde Baru sebagian besar berupa bantuan proyek, yang kita gunakan secara langsung untuk pembangunan ekonomi. Jumlah bantuan proyek ini hampir US \$ 5 milyar. Sisanya, sebesar US \$ 3,3 milyar, berupa bantuan-bantuan program. dalam bentuk pangan, kapas kasar dan devisa kredit serta pinjaman-pinjaman lainnya. Jangan kita mengira bahwa bantuan program ini bersifat konsumtif. Karena: bantuan program yang berbentuk pangan, kapas kasar, bahan-bahan baku lainnya dan devisa kredit itu dijual oleh Pemerintah kepada masyarakat sehingga menghasilkan penerimaan Rupiah. Dan seluruh penerimaan Rupiah ini telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pembangunan, sehingga keseluruhannya benar-benar kita gunakan untuk membangun.

Di masa datang kita masih memerlukan bantuan luar negeri agar pembangunan kita dapat bergerak lebih cepat.

Masalah yang penting bagi kita adalah kemampuan membayar kembali bantuan-bantuan tadi, tanpa merusak gerak pembangunan kita dan tanpa membebani terlalu berat generasi yang akan datang. Untuk itu nilai ekspor kita harus naik. Dalam tahun 1976/77 nilai ekspor kita ditambah penerimaan bersih dari minyak diperkirakan berjumlah US \$ 5,8 milyar, suatu kenaikan 9 kali lebih jika dibandingkan dengan hasil ekspor kita dalam tahun 1965, yang hanya berjumlah US \$ 636 juta. Dalam tahun 1980/81 jumlah itu diharapkan menjadi US \$ 10,4 milyar dan US \$ 18,7 milyar pada tahun 1985/86.

Dalam tahun-tahun mendatang pelunasan hutang dan bunga dari Pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara — termasuk hutang Pertamina yang besar — diperkirakan akan bertambah besar. Menjelang akhir tahun tujuh puluhan nanti jumlahnya akan mencapai 19% dari nilai ekspor kita dan kemudian menurun kembali menjadi di bawah 15% semenjak tahun 1983/84.

Demikian, Saudara Ketua, telah saya jelaskan mengenai bantuan luar negeri.

Membangun suatu masyarakat bukan lah urusan Pemerintah saja. Karena itu masyarakat hams bangkit kekuatannya untuk ikut membangun. Saya tidak perlu menjelaskan lagi bahwa di luar pemba-

ngunan yang ditangani Pemerintah, maka pihak swasta telah juga ikut membangun dengan uluran tangan Pemerintah berupa pemberian kredit. Satu hal yang perlu saya jelaskan, bahwa membantu pihak swasta itu Pemerintah sangat memperhatikan pembinaan golongan ekonomi lemah. Setiap musim tanam Pemerintah telah memberikan kredit bermilyar rupiah kepada petani dalam rangka program Bimas padi dan lain-lainnya.

Bagi pengusaha-pengusaha yang tidak besar — terutama pengusaha-pengusaha pribumi — telah disetujui lebih dari Rp. 90 milyar untuk Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal; Kerja Permanen. Kredit-kredit ini telah menggerakkan puluhan ribu pengusaha-pengusaha kecil dan industri-industri kecil.

Dua tahun yang lalu Pemerintah juga telah mulai memberikan "Kredit Mini", kredit kecil, berjumlah Rp. 10.000,— sampai Rp. 100.000,— untuk tiap nasabah. Kredit ini tertuju kepada masyarakat desa: kepada petani, pedagang, pengrajin, nelayan, buruh tani, buruh nelayan, buruh pemborong dan sebagainya. Lebih dari 100.000 orang telah mendapat "Kredit Mini" ini. Dengan kredit kecil itu mereka dapat meningkatkan kemampuan dan produksi yang mereka usahakan Kredit tersebut dipakai untuk membeli peralatan, membeli bahan bake dan sebagainya.

Dan kita juga tidak akan berhenti di sini. Dalam beberapa bulan lagi, Insya Allah, segera akan berjalan "kredit candak kulak", ialah kredit untuk "bakul-bakul" atau pedagang kecil-kecilan di desa-desa. Tata cara memperoleh kredit "candak kulak" sangat sederhana, sesuai dengan sederhananya kegiatan pedagang kecil di desa-desa itu. Tidak perlu ada jaminan bank; cukup dijamin oleh Kepala Desa dan orang-orang terkemuka setempat. Usaha tahap permulaan, belum semua pedagang desa dapat memperoleh kredit ini; sebab kita akan memulai dahulu dengan proyek-proyek percontohan di Jawa dan Bali: setiap Kecamatan satu proyek.

Semuanya itu merupakan usaha agar pembangunan ini benar-benar merata, agar pembangunan ini mempunyai akar-akar yang kuat dalam masyarakat kita. Ya, agar "orang-orang kecil" dapat

bangkit, agar "orang-orang kecil" dapat ikut serta dan merasakan arti pembangunan roil

Pemerintah terus memberi dorongan kepada masyarakat dan swasta agar berperan makin besar dalam pembangunan. Dalam memberi dorongan ini azas keadilan juga sangat diperhatikan. Karena itu dalam kebijaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri misalnya, maka dalam tahun-tahun terakhir ini golongan pribumi mendapat perhatian yang lebih besar, antara lain pemberian kredit investasi sekarang hanya diberikan kepada golongan pribumi. Ini bukan sikap pembedaan keturunan, melainkan, karena dalam kenyataannya golongan pribumi ini umumnya termasuk yang berekonomi lemah.

Dalam gerak pembangunan nasional itu masyarakat harus memainkan peranan yang aktif. Hal ini merupakan wujud penting daripada Demokrasi Ekonomi seperti yang telah ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Karena itu Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim yang menggairahkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, wajib memberikan pengarahan dan wajib memberikan bimbingan. Hal itu jelas merupakan kewajiban yang penting sebab hakekat pembangunan adalah pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Tanpa ikut sertanya masyarakat maka pembangunan itu tidak mungkin akan berhasil.

Kita ingin dan bertekad agar kita dapat menjadi "tuan di rumah kita sendiri".

Kita lah, dan bukan orang lain, yang harus mampu mengurus masa depan kita sendiri, yang harus mampu menciptakan kesejahteraan yang kita cita-citakan sendiri dan yang kita wujudkan dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah azas yang penting. Namun demikian ini juga sama sekali tidak berarti bahwa kita menutup diri terhadap dunia luar.

Untuk melengkapi ketrampilan dan modal yang masih kita perlukan dewasa ini kita membuka pintu bagi masuknya penanaman modal asing. Tetapi juga merupakan kewajiban kita untuk mengamankan agar penanaman modal asing itu tidak merupakan bahaya, lebih-lebih kita tidak akan membiarkan diri sehingga ekonomi nasional kita beralih ke tangan orang lain. Karena itu ikut sertanya pe-

nanaman modal asing dalam pembangunan kita, sejak semula, kita letakkan di atas dasar saling hormat menghormati dan saling menguntungkan. Dalam rangka mewujudkan kekuatan ekonomi nasional maka keikutsertaan tenaga, ketrampilan dan modal Indonesia harus juga masuk ke dalam kegiatan dan usaha penanaman modal asing itu. Apa yang saya tegaskan ini bukanlah hal baru; melainkan merupakan strategi dan garis yang telah kita tentukan sejak semula. Apa yang saya katakan tadi tidak lah lain adalah ketegasan-ketegasan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing. Azas dasar itu, sikap dan penerimaan kita terhadap penanaman modal asing sama sekali tidak berubah. Yang harus kita lakukan adalah menentukan prioritas-prioritas bidang usaha yang perlu kita dorong sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan produksi di dalam negeri pada suatu waktu.

Mungkin saja penanaman modal asing dalam suatu bidang usaha tertentu yang lima tahun yang lalu masih kita perlukan dan kita berikan prioritas, sekarang ini sudah tidak lagi karena produksinya sudah dicukupi oleh penanam-penanam modal yang telah ada.

Sidang Dewan yang terhormat;

Dewasa ini sedang berkembang pikiran-pikiran dan ikhtiar bagaimana membuat kehidupan bersama bangsa-bangsa di dunia ini lebih adil dari yang kita rasakan sampai sekarang.

Kebijaksanaan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu juga kita arahkan untuk ikut membangun dunia yang lebih adil baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik.

Mengatur perjoangan untuk keadilan ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang itu pula yang kita anggap penting dalam Konferensi Non Blok di Colombo, Sri Lanka, yang hari ini dibuka. Saya sangat menyesal tidak dapat hadir dalam konferensi yang penting itu karena bertepatan dengan saat-saat kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang bagi kita sangat penting artinya.

Negara-negara Non Blok perlu memelihara semangat lama yang mendorong kelahirannya, tetapi harus menegaskan tujuan-tujuannya yang baru.

Semangat itu ialah memelihara kebebasannya dari pertarungan kekuatan-kekuatan besar, memperkuat perdamaian dan memelihara ketetiaakawanan antara mereka yang senasib.

Dan tujuan bam yang perlu ditegaskan — seperti saya singgung tadi — adalah perjoangan untuk keadilan dunia dan penggalakan pembangunan.

Dengan semangat dan tujuan itu, Indonesia sebagai salah satu pendiri Non Blok, akan tetap berperan di dalamnya. Hendaknya kita ingat bahwa Indonesia bukan masuk ke dalam Non Blok. Republik Indonesia sejak lahir 31 tahun yang lalu adalah sudah non blok. Tidak pernah satu jengkal tanah pun yang kita biarkan menjadi pangkalan minter asing, tidak satu pasal pun kita pernah membentuk pakta-pakta militer dengan negara lain.

Kita bangga dengan kenyataan itu karena dengan demikian kita Tidak pernah mengkhianati politik luar negeri kita yang bebas aktif.

Apabila hubungan kita dengan negara-negara lain pernah dingin atau beku, maka justru hal itu karena keteguhan pendirian kita untuk tidak mengekor dan tidak mau didikte oleh negara lain betapapun besar dan kuatnya negara itu. Hubungan kita yang masih beku dengan Republik Rakyat Cina harus dilihat dalam kerangka itu. Apabila kedua belah pihak dapat saling hormat menghormati, mengakui penuh kedaulatan dan urusan dalam" negeri masing-masing, menganggap hubungan antara keduanya bermanfaat, maka pendekatan antara keduanya dan normalisasi hubungan pasti tidak ada halangannya.

Kita bersyukur bahwa politik luar negeri yang bebas aktif yang kita jalankan secant lurus dan konsekwen makin hari makin difahami oleh negara-negara lain.

Memang, kita kadang-kadang tidak sejalan pendapat dengan kawan-kawan kita atau dengan negara-negara lain. Tetapi hal itu tidak merupakan cela.

Perbedaan pendapat adalah wajar karena kepentingan nasional masing-masing dan pandangan hidup masing-masing berbeda. Kita terima perbedaan itu tanpa kita sendiri mengorbankan apa yang kita anggap

baik. Karena itu kita tidak mengumandangkan konfrontasi, melainkan kita jembatani perbedaan pendapat dengan konsultasi. Ini bukan sikap lemah, melainkan justru merupakan tanda dari kepercayaan pada diri sendiri. Ini adalah sikap yang lebih wajar dan lebih realistis karena pada jaman ini konfrontasi bukan merupakan cara penyelesaian persoalan.

Kita diterima dengan baik di mana-mana. Kita anggota Non Blok, kita ikut serta dalam Konferensi Negara-negara Islam, kita ikut dalam perembuan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang di Paris, kita termasuk Negara Kelompok 77 yang terdiri dari negara-negara Dunia Ketiga, kita anggota OPEC dan kita anggota ASEAN.

Keanggotaan kita di bermacam-macam kelompok negara itu membuat politik luar negeri kita lebih lincah.

Bagi kita, perkembangan yang paling membesarkan, hati adalah pertumbuhan ASEAN. Tidak sedikit yang menganggap perhimpunan ini hanya ada di atas kertas dan tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang nyata dan berguna. Ada juga yang mencurigai, perhimpunan kita itu sebagai boneka bare ciptaan asing.

Tetapi di Bali — pada awal tahun ini -- semuanya itu telah terbantah. Di sana Kepala-kepala Pemerintahan Negara-negara ASEAN telah menancapkan tonggak sejarah.

Di sana telah diletakkan tatanan baru untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi ASEAN. Babak baru Asia Tenggara telah dibuka: babak perdamaian dan kerjasama untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jauh daripada sikap bermusuhan atau melibatkan diri dalam pertentangan, ASEAN telah mencanangkan tekadnya untuk menjadikan kawasan ini menjadi wilayah yang Damai, Bebas dan Netral. Kita menginginkan agar hanya semangat persahabatan dan kerjasamalah yang menyala-nyala di wilayah ini; dan- satu-satunya perjuangan yang ada hanyalah perjuangan untuk membebaskan diri dari kemelaratan dan keterbelakangan! ASEAN tidak ada niat untuk menjerus pada persekutuan militer. Kita malahan mengulurkan tangan persahabatan dan kerjasama kepada negara-negara tetangga dan kelompok regional lainnya.

Dalam Pertemuan Puncak di Bali itu kita telah meyakinkan diri sendiri dan mengumandangkan kepada dunia bahwa kerjasama regional kita itu telah memasuki tahap kerjasama yang melembaga; tidak hanya merupakan tekad, keyakinan dan semangat untuk bekerjasama belaka. Jaman baru Asia Tenggara telah dirancang dan segera dibangun di atas landasan yang kokoh.

Karena itu sama sekali tidak benar bahwa kita dikucilkan dunia. Kita tidak dikucilkan karena kita terus menekankan perlunya pembangunan ekonomi; juga tidak dipencilkan karena politik luar negeri kita abdikan kepada kepentingan ekonomi seperti yang ditegaskan oleh MPR. Malahan di ASEAN, di perundingan Paris, di konperensi UNCTAD di Nairobi kita berperan dalam memberi sumbangan fikiran serta memelihara persatuan dan kesetiakawanan negara-negara berkembang.

Kita juga tidak dikucilkan dunia karena masalah Timor Timur. Kita sudah menegaskan berulang kali bahwa masalah Timor Timur adalah masalah penentuan nasib sendiri. Masalah Timor Timur adalah masalah penghapusan penjajahan. Nasib rakyat Timor Timur hanya boleh ditentukan oleh rakyat Timor Timur sendiri dan di bumi Timor Timur. Bukan ditentukan di New York, bukan di Lisabon dan juga bukan di Jakarta.

Dan sekarang, rakyat Timor Timur telah menentukan masa depan mereka sendiri; ialah menyatukan diri dengan Rakyat dan Negara Republik Indonesia. Karena itu tidak dapat lain: penyatuan harus kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab.

Satu hal juga harus kita junjung tinggi, ialah segala sesuatu yang mendasar haruslah kita tempuh melalui jalan konstitusionil. Karena itu, penggabungan Timor Timur ke dalam Republik Indonesia harus tetap dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti Timor Timur menjadi Daerah Tingkat I yang ke-27. Tentu saja karena keadaan daerah yang masih sangat terbelakang dan karena luka parah yang diderita oleh pertikaian bersenjata yang kejam, maka diperlukan masa peralihan sebelum Daerah Tingkat I Timor Timur itu berdiri sejajar dengan Daerah-daerah Tingkat I lainnya di negara kita ini.

Landasan konstitusional lainnya yang penting adalah, bahwa penyatuan itu harus diperkuat oleh Undang-undang sebagai cermin dari persetujuan seluruh Rakyat Indonesia. Saya berterima kasih kepada DPR yang terhormat, karena Undang-undang Penyatuan itu telah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Dan saya berpendapat, bahwa masih ada satu putusan konstitusional lain yang perlu, ialah dikukuhkannya penyatuan ini oleh MPR hasil Pemilihan Umum yang akan datang. Hal ini penting, karena menerima penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan tugas yang dibebankan oleh MPR kepada Mandataris.

Dan sekarang, dari mimbar ini, menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 31, saya secara resmi mengumumkan kepada Rakyat Indonesia, kepada Rakyat Timor Timur dan kepada dunia, bahwa Rakyat dan Wilayah Timor Timur telah menjadi satu dengan Rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan kehendak yang bebas dari Rakyat Timor Timur sendiri- yang diterima dengan hangat oleh seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia.

Kepada Rakyat Timor Timur saya menyampaikan ucapan selamat atas putusannya yang tepat ini. Kami tidak memandang Saudara-saudara sebagai tamu yang baru datang. Kami menganggap Saudara-saudara sebagai saudara sekandung yang sekarang kembali ke tengah-tengah kami, ke tengah-tengah keluarga besar Bangsa Indonesia.

Kami kagum atas ketabahan hati Saudara-saudara dalam perjuangan yang berat. Kami kagum atas ketetapan had Saudara-saudara yang tidak tergoyahkan untuk menentukan nasib dan masa depan sendiri. Pada saat-saat bersejarah ini, kita semua teringat pada mereka yang telah gugur dalam perjuangan yang suci dan mulia itu, perjuangan Rakyat untuk menegakkan hak-haknya yang syah, yang tidak dapat direnggut oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun. Marilah kita tundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, agar mereka mendapat tempat yang layak di sisi-Nya, karena mereka telah mengorbankan diri untuk menegakkan hak-hak asasi manusia yang juga berasal dari pada-Nya.

Tetapi tugas kita ke dalam dan ke luar belum berakhir di sini. Ke dalam, tugas pembangunan telah menunggu di Timor Timur yang saat ini dalam keadaan terbelakang karena penjajahan yang panjang. Ke luar, kita masih harus meyakinkan dunia bahwa penggabungan itu adalah kehendak Rakyat Timor Timur sendiri,

Saya ajak seluruh Rakyat Timor Timur, untuk memulai dengan kehidupan baru di alam merdeka ini bekerja keras untuk pembangunan Bangsa dan pembangunan Daerahnya. Saya juga menyerukan kepada mereka yang sesat karena terpengaruh oleh bujukan jahat dari apa yang menamakan dirinya Fretilin untuk kembali ke jalan yang benar dan bersama-sama dengan Saudara-saudaranya yang lain memulai kehidupan yang tertib dan normal kembali.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Saya telah mengajak kita semua untuk melihat kembali sepintas jalan dan arah pembangunan yang telah kita tempuh selama ini.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut tidaklah ada alasan kita untuk berkecil hati, terlebih-lebih untuk menyangsikan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai sebagai hasil dari pembangunan yang sedang kita lakukan, dan bahwa hasil pembangunan itu juga telah merata dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Tetapi, meskipun demikian kita tidak boleh merasa puas diri, apalagi membusungkan dada dan membangga-banggakan diri atas hasil-hasil tersebut. Sebaliknya kita harus tetap prihatin dan waspada. Hasil-hasil yang kita capai itu baru lah hasil-hasil permulaan. Masih banyak masalah-masalah besar yang kita hadapi dan kita pecahkan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki.

Saya tidak Akan menutup mata bahwa masih ada ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat kita. Saya juga tahu, bahwa masih Ada kelemahan-kelemahan dalam tubuh aparaturnya Pemerintah.

Pemerintah terus berusaha membina aparaturnya dan mengadakan penertiban-penertiban agar pembangunan berjalan makin lancar.

Tahun Pemerintah bertindak tegas terhadap penyelundupan, karena penyelundupan sangat merugikan negara dan masyarakat; me-

rugikan penerimaan negara, menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan merusak martabat dan moral pejabat-pejabat dan aparatur Pemerintah.

Karena itu penyelundupan harus diberantas tanpa pandang bulu. Hasil-hasil dari tindakan tegas itu dewasa ini sudah tampak. Sejak dilancar-kannya tindakan-tindakan tegas beberapa bulan yang lalu maka penerimaan negara dari bea masuk meningkat, meskipun pemasukan barang-barang tertentu dari luar negeri — yang biasanya diselundupkan — menurun jumlahnya. Dan kegiatan produksi dalam negeri, yang beberapa bulan yang lalu mengalami kelesuan, dewasa ini mulai lancar kembali

Sementara itu ada bahaya besar yang sedang merayap mendekati Bangsa kita. Bahaya ini adalah narkoba, ganja dan sejenisnya. Kita harus mulai awas dari sekarang; malahan harus menghancurkannya sebelum bahaya ini menjadi besar dan menelan Bangsa ini di masa datang.

Kita harus bertindak keras sekarang demi keselamatan generasi yang akan datang. Dengan diselesaikannya oleh Dewan yang terhormat, bersama-sama Pemerintah dalam waktu yang cepat sebuah Undang-undang tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman yang berat, diharapkan akan membuat jera pengedar gelap dan pecandu; malahan calon-calon pengedar dan calon pecandu baru akan takut sebelum mereka berbuat. Saya instruksikan kepada aparatur Pemerintah dan alat-alat keamanan yang berwenang untuk meneruskan usaha pemberantasan dan penindakan terhadap penyelundup dan pengedar-pengedar gelap serta pelaku-pelaku narkotik ini.

Dari mimbar ini saya mengajak para orang tua, para pendidik, organisasi masyarakat dan kaum muda sendiri untuk sungguh-sungguh menyingkirkan bahaya ini selagi masih pada taraf permulaan.

Sekali lagi, Pemerintah harus bertindak keras terhadap penyakit-penyakit yang dilihat dari segala sudut jelas merugikan masyarakat dan pembangunan ini.

Saudara Ketua yang terhormat;

Mengenai aparaturnya Pemerintah, langkah-langkah terus diambil untuk menegakkan aparaturnya yang tertib, bersih dan berwibawa. Perbaikan gaji telah beberapa kali diadakan. Kesejahteraan pegawai terus diperhatikan: Perawatan kesehatan terus diefektifkan, penyediaan perumahan sederhana bagi pegawai golongan rendah mulai dilaksanakan dan sebagainya. Peralatan kerja dan kantor-kantor dicukupi agar pegawai dapat melaksanakan tugas lebih tenang dan lancar. Tahun ini Pemerintah tidak menaikkan gaji pegawai negeri. Namun dewasa ini sedang disiapkan perbaikan sistem gaji, yang bukan saja akan meningkatkan gaji pegawai, tetapi juga akan memperbaiki pensiunnya. Insya Allah sistem baru itu akan dapat dilaksanakan dalam tahun depan. Dengan jaminan pensiun yang lebih baik, diharapkan selama bekerja para pegawai negeri dapat mempertahankan kejujuran dan pengabdian kepada masyarakat.

Pejabat dan pegawai negeri adalah pelayan masyarakat; bukan sebaliknya, masyarakat harus melayani mereka. Pejabat atau pegawai negeri janganlah meng "komersial" kan jabatan atau tugasnya, hanya melaksanakan tugasnya apabila ada harapan imbalan jasanya dan sebaliknya enggan, apabila tidak ada. Setiap pegawai dan pejabat, di Pusat maupun di Daerah hendaknya tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang sepatutnya tidak dikerjakan. Kepada pejabat dan pegawai atasan saya minta memberikan contoh tauladan dan bersikap tegas untuk menegakkan disiplin dan kewibawaan.

Kepada kalangan dunia usaha kepada seluruh masyarakat, saya ajak untuk tidak memberikan "uang pelancar" atau imbalan jasa apapun kepada pejabat atau pegawai negeri yang memang berkewajiban melayani masyarakat. Pemberian semacam itu merupakan racun yang dapat menggoyahkan disiplin dan sendi-sendi ketertiban serta kejujuran pegawai dan seluruh aparaturnya. Apa yang dinamakan pungutan liar misalnya, yang kita usahakan agar dapat dihapuskan karena memberatkan rakyat, tidak akan dapat terlaksana, apabila "pemberian" semacam itu oleh para usahawan dan swasta pada umumnya tidak dihentikan. Hendaknya disadari pula bahwa yang menerima "suap" dan yang memberi "suap" sama salahnya.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara — artinya pejabat dan pegawai — harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Kita juga diingatkan bahwa yang penting adalah semangat para penyelenggara Negara.

Karena itu lah segala langkah Pemerintah, segala tindak tanduk pejabat dan kita semuanya, harus sesuai dan dijiwai oleh "peringatan" yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu.

Hal lain yang perlu untuk dilaksanakan dengan setulus-tulusnya oleh mereka yang serba kecukupan adalah melaksanakan hidup sederhana. Saya tegaskan di sini bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup kemelarat-melaratan atau hidup bermalasan-malasan.

Sesuai dengan falsafah Pancasila setiap orang dibenarkan berusaha dan mencari kekayaan secara syah dan halal. Tetapi bagi yang berhasil dan memiliki kekayaan yang berlebih, hendaknya menggunakan kekayaannya itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. jangan menggunakannya untuk pameran kekayaan, yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Perlu ada pengawasan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Inilah inti sikap mawas diri, yang juga harus menjadi sikap dasar Orde Baru, Pengawasan tidak berarti mencari-cari kesalahan, pengawasan berarti sikap jujur untuk berjalan lurus kepada cita-cita yang mulia, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Kita harus membudayakan lembaga pengawasan ini, agar melekat dalam hati nurani kita masing-masing; diterima dengan tulus oleh yang diawasi dari diperingatkan dengan jujur oleh yang mengawasi,

Pengawasan yang baik dan efektif sebenarnya juga dapat dilakukan oleh pers dan masyarakat melalui pers. juga pengawasan dari masyarakat kepada masyarakat. Banyak tulisan-tulisan dan pandangan-pandangan bermutu yang dapat kita ikuti, dalam tajuk-tajuk rencana surat-surat kabar; dalam tulisan-tulisan dan malahan dalam ruangan "pembaca menulis". Semuanya itu adalah tanda-tanda bahwa kebebasan dan tanggung jawab pers sedang berkembang. Kita semua

mengharapkan agar peranan pers yang demikian terus ditingkatkan dengan tanggung jawab yang makin benar. Ada satu dua surat kabar atau penerbitan yang dicabut Surat Ijin Terbit atau Surat Ijin Cetaknya. Tindakan itu terpaksa diambil karena mereka menggunakan pers secara salah. Karena itu kita mengharapkan agar pers sendirilah yang pertama-tama harus menjunjung tinggi martabat dan perannya, menjaga kebebasan dan memperbesar tanggung jawabnya.

Kebebasan dan tanggung jawab ini juga perlu dikembangkan oleh generasi muda, agar timbul kreativitas dan dorongan-dorongan baru untuk menggerakkan masyarakat yang membangun.

Pembangunan juga berarti membangun masa depan. Karena itu pembinaan generasi muda, penerus kehidupan Bangsa dan tunas-tunas muda Bangsa ini, sama sekali tidak kita abaikan. Kehidupan kepramukaan, kehidupan kemahasiswaan dan kehidupan kepemudaan pada umumnya juga telah makin berkembang. Pembentukan KNPI kita harapkan benar-benar menjadi wadah pemersatu dan wadah kegiatan bagi semua golongan pemuda. Kita semua menginginkan agar kaum muda tetap peka terhadap masalah-masalah Bangsa dan Negara agar mereka dapat ikut memikirkan dan mencari jalan keluar yang baik, agar mereka dapat melatih diri dan memupuk kepemimpinan yang akan meneruskan perjalanan Bangsa ini. Saya minta agar para mahasiswa dan kaum muda jangan mudah terpancing oleh berbagai isu-isu yang sengaja dihembus-hembuskan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau mereka yang sebenarnya tidak mengerti duduk persoalan. Para mahasiswa dan kaum muda hendaknya kritis dalam melihat persoalan dan menyaring apa yang mereka dengar.

Salah lah anggapan yang mengira bahwa generasi yang lebih tua memusuhi generasi yang lebih muda. Apabila ada teguran dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda, dan demikian juga sebaliknya, maka hal itu harus dianggap sebagai rasa kecintaan dan rasa sama-sama bertanggung jawab terhadap kesentosaan pertumbuhan Bangsa kita di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pembinaan generasi muda yang kurang diperhatikan orang, padahal telah berkembang adalah kepercayaan yang telah diberikan

kepada generasi muda — sarjana-sarjana muda, teknisi-teknisi muda, pengusaha-pengusaha muda — untuk memimpin dan menangani banyak proyek-proyek pembangunan, termasuk yang besar-besar dan menggunakan teknologi mutakhir. Banyak proyek-proyek besar dan kegiatan-kegiatan penelitian yang berada di bawah pimpinan dan ditangani oleh orang-orang muda. Ini sungguh merupakan bekal bagi tugas-tugas mereka di masa datang. Kita bangga kepada mereka, kita percaya kepada kemampuan dan pengabdian mereka. Oleh karena itu kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam masa pembangunan ini perlu benar-benar dimanfaatkan oleh generasi muda dan oleh kita semua. Dengan demikian maka makin tebal kepercayaan kita bahwa Bangsa Indonesia akan mampu mencapai kemajuan dan kebahagiaan di masa-masa mendatang.

Kebebasan dan tanggung jawab — baik oleh masyarakat dan pers akan memperkokoh stabilitas nasional yang dinamis.

Stabilitas nasional, khususnya stabilitas keamanan yang dewasa ini telah mulai mantap, perlu terus kita pelihara, terutama menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang.

Dalam rangka ini ABRI harus terus mengkonsolidasikan diri, terus memelihara dan mempertebal disiplin dan semangat TNI sebagai pejuang. Demikian pula integrasi ABRI dan integrasi ABRI dengan Rakyat perlu tetap dibina. Angkatan Perang dan POLRI dewasa ini mempunyai kemampuan yang cukup untuk memelihara keamanan dan ketenangan dalam negeri. Untuk tetap meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kemungkinan tugas-tugas mendatang, maka perbaikan peralatan untuk kebutuhan pertahanan-keamanan dan perbaikan kesejahteraan prajurit perlu diusahakan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang saya hormati;

Sejalan dengan stabilitas politik yang bertambah kuat, sejalan dengan ketahanan nasional kita yang makin mantap, sejalan dengan pembangunan yang makin terasa hasilnya oleh masyarakat banyak, maka kita dapat segera menyelesaikan secara keseluruhan salah satu masalah nasional kita, ialah mereka yang ditahan karena terlibat dalam pemberontakan G-30-S/PKI.

Seperti kita tahu tahanan G-30-SJPKI golongan C telah lama kita bebaskan seluruhnya. Tahanan yang termasuk golongan A telah banyak yang mendapat keadilan dari pengadilan; sisanya pasti diselesaikan. Dan untuk golongan B yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan melalui pengadilan karena tidak cukup bahan-bahan bukti, akan dipercepat penyelesaiannya, Insya Allah, setelah kita selesai melaksanakan Pemilihan Umum tahun depan.

Bagaimana pun juga, betapa kesalahan mereka telah nyaris menjerumuskan Bangsa dan Negara kita ke jurang kehancuran, mereka tetap sesama keluarga besar Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Mereka, harus kita terima kembali ke dalam masyarakat kita. Mereka harus kita insyafkan terhadap kekeliruan mereka dahulu, mereka kita ajak untuk ikut membangun kembali kehidupan pribadinya dan bersama-sama membangun masyarakat.

Benteng yang paling kokoh untuk menghindarkan Bangsa ini dari segala bentuk pemberontakan dan guncangan-guncangan lain adalah pembangunan yang maju, adil dan merata. Pembangunan yang benar-benar secara jelas mengarah pada terwujudnya Pancasila dalam segala kehidupan kita.

Karena itu lah Pancasila bukan saja cukup jika kita miliki, tetapi harus kita resapi sedalam-dalamnya, harus kita hayati sehingga menjadi bagian jiwa dan tingkah laku kita, harus kita amalkan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kemasyarakatan kita.

Marilah kita terus memasyarakatkan Pancasila dan mempancasilakan masyarakat kita!

Untuk itu perlu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang jelas dan mudah difahami oleh masyarakat luas, oleh kita semua.

Landasan atau dasar pokok untuk dapat dengan mudah menghayati dan mengamalkan Pancasila adalah terletak pada sifat hakekat pribadi kita sendiri sebagai insan atau makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita harus menyadari, harus mampu bertanggung jawab dan mampu mengendalikan diri pribadi sendiri, membatasi kepentingan pribadi untuk memenuhi kewajiban sebagai makhluk sosial.

Dengan landasan atau dasar tekad dan kesadaran yang demikian itu — mengendalikan diri pribadi untuk membatasi kepentingan pribadi guna memenuhi kewajiban sebagai makhluk sosial — maka mudahlah kita menghayati dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila.

Terhadap sila "Ketuhanan Yang Mahaesa", maka penghayatan dan pengamalannya adalah: sebagai manusia yang takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa sesuai dengan keyakinan agama/kepercayaan masing-masing, kita wajib menghargai orang lain yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa yang berbeda.

Terhadap sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab", penghayatan dan pengamalannya adalah: sebagai manusia yang berperikemanusiaan, kita wajib mencintai dan selalu ingat kepada orang lain, wajib tepa selira dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.

Terhadap sila "Persatuan Indonesia": sebagai manusia Bangsa Indonesia, kita harus cinta kepada Tanah Air, mengutamakan kepentingan Tanah Air, Nusa dan Bangsa di atas kepentingan pribadi.

Terhadap sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", penghayatan dan pengamalannya adalah: sebagai manusia yang demokratis kita harus selalu patuh pada hasil musyawarah dan permusyawaratan bersama.

Terhadap sila "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia", penghayatan dan pengamalannya adalah: sebagai manusia yang sosial, kita wajib menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan untuk meningkatkan kemampuannya.

Pedoman atau gagasan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang demikian itu telah pernah sap kemukakan pada peserta Musyawarah kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka beberapa bulan yang lalu.

Gagasan tersebut saya namakan "Eka Prasetia Panca Karsa".

"Eka Prasetia" berarti janji atau tekad kita yang satu bahwa sebagai manusia makhluk sosial, kita harus berani dan mampu untuk mengendalikan kepentingan pribadi guna memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial — sebagai warga masyarakat — dalam

mewujudkan kehidupan Pancasila. Dan yang kita janjikan atau tekad kita itu adalah untuk melaksanakan Panca Karsa — lima keinginan, lima kemauan yang keras — ialah pengetrapan kesadaran sebagai makhluk sosial itu terhadap lima sila dari Pancasila yang saya sebutkan tadi.

Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu harus kita renungkan bersama sedalam-dalamnya dan harus kita pikirkan semasak-masaknya.

Karena itu saya telah meminta kepada kalangan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian agar mengkaji masalah itu dari sudut ilmu pengetahuan. Saya tugaskan kepada Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional untuk menghimpun gagasan-gagasan atau saran-saran tersebut. Maksudnya adalah agar kita menemukan pedoman bersama yang jujur dan benar, yang tidak terpengaruh hanya oleh selera pribadi atau golongan. Hasil pengkajian itu saya usulkan nanti agar menjadi bahan pertimbangan bagi MPR untuk memutuskan dan mengukuhkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu.

Waktu-waktu sekarang ini, saya anggap tepat untuk memikirkan hal itu. Dewasa ini kita sedang giat-giatnya melaksanakan REPELITA II. Pembangunan telah mulai menampakkan hasilnya dan mulai kokoh perjalanannya. Kita hams sadar, bahwa apa yang kita kerjakan dan juga apa yang tidak kita kerjakan sekarang ini akan mempunyai pengaruh yang benar terhadap arah dan wujud masyarakat Indonesia di masa datang. Tentu saja apa yang kita saksikan sekarang belum merupakan wujud masyarakat Pancasila seperti yang kita angan-angkan.

Dalam ukuran sejarah apa yang kita kerjakan barulah perjalanan awal. Dan justru karena perjalanan awal, maka langkah kita harus benar.

Itu berarti mulai sekarang dasar-dasar untuk penghayatan dan pengamalan Pancasila sudah harus mulai kita letakkan secara jelas, teratur dan kuat dalam pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan politik kita.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Mewujudkan masyarakat Pancasila itu lah tujuan panjang perjuangan kita.

Kita telah memiliki rencana-rencana untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan; seperti misalnya REPELITA I dahulu, REPELITA II sekarang dan REPELITA-REPELITA yang akan datang. Dengan rencana-rencana itu kita dapat mencapai apa yang kita harapkan dan kita dapat menghindari apa yang tidak kita harapkan. Tetapi rencana-rencana — yang baik sekalipun sama sekali bukan mukjizat. Ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia untuk memperkirakannya; setidaknya-tidaknya banyak hal yang dengan bantuan ilmu pengetahuan pun kita belum dapat meramalkan dari sekarang. Tahun ini dunia banyak mengalami bencana alam. Kita tidak luput dari bencana gempa bumi dengan korban yang banyak di Irian Jaya dan di Bali. Marilah kita bantu mereka yang terkena musibah itu. Marilah kita tundukkan kepala untuk menghormati mereka yang tewas dan mohon kepada Tuhan agar arwah mereka diterimaNya dengan baik.

Pembangunan memang tidak sepi dari cobaan.

Kita masih harus berjalan lebih jauh lagi-sebelum kita mewujudkan masyarakat Pancasila: masyarakat dengan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan yang menjadi vita-cita kita bersama.

Yang telah kita tempuh sekarang barulah bagian-bagian permulaan daripada perjalanan yang akan panjang itu, Namun, yang terang; perbaikan kehidupan telah mulai terasa. Karena itu lah kita percaya, bahwa arah dan jalan yang kita tempuh telah benar. Tentu saja banyak hal yang harus kita perbaiki dan masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Pembangunan itu sendiri memang merupakan proses yang panjang. Dan hasilnya pun mungkin belum seluruhnya segera kita rasakan sekarang juga. Apabila kita bekerja hari ini, maka hasilnya baru akan kita rasakan beberapa tahun nanti.

Tetapi kita akan tabah dalam melampaui beban tuntutan yang diminta oleh pembangunan tadi, karena pada akhirnya kita sendiri dan anak cucu kita yang akan merasakan hasil pembangunan itu.

Kita akan terus bergerak maju bahu membahu. Kita akan terus mempertebal kesetiakawanan sosial.

Yang telah kita capai akan kita pelihara dan kita tingkatkan.

Yang belum kita kerjakan kemarin akan kita kerjakan hari ini.

Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa apabila bangsa itu sendiri tidak merubah nasibnya!

Karena itu kita harus bekerja dan bekerja. Kita harus bergerak dan terus bergerak maju.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O .
